

**PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS
TERHADAP KERAJINAN BAMBU CAPING
RINGINGAGUNG MAGETAN
(Studi Kasus Desa Ringinagung Kecamatan Magetan Kabupaten
Magetan)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

HANDIANANTA PRATAMA NUGRAHA

C100160073

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP
KERAJINAN BAMBU CAPING RINGINGAGUNG MAGETAN
(Studi Kasus Desa Ringinagung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

HANDIANANTA PRATAMA NUGRAHA

C100160073

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



(Inayah, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP
KERAJINAN BAMBU CAPING RINGINGAGUNG MAGETAN
(Studi Kasus Desa Ringinagung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan)**

**OLEH
HANDIANANTA PRATAMA NUGRAHA
C100160073**

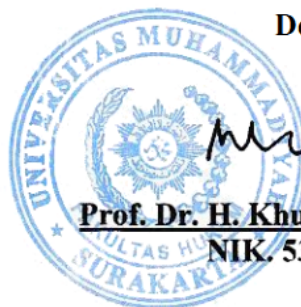
**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Jum'at, 13 November 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. Inayah, S.H., M.H
Ketua Dewan Penguji
2. Dr. Rizka S.Ag.,M.H.
Anggota I Dewan Penguji
3. Prof. Dr. Absori, S.H., M. Hum
Anggota II Dewan Penguji

()
()
()

Dekan,



**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimvati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya ini diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 13 November 2020

Penulis



HANDIANANTA PRATAMA NUGRAHA

C100160073

**PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP
KERAJINAN BAMBU CAPING RINGINGAGUNG MAGETAN
(Studi Kasus Desa Ringinagung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan)**

Abstrak

Bambu Caping adalah salah satu produk hasil kerajinan tangan yang memiliki potensial untuk dapat memperoleh perlindungan Indikasi Geografis. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/ atau produk yang dihasilkan. Permasalahan yang terdapat pada kerajinan bambu caping adalah mengenai perlindungan hukum yang tidak kunjung dilakukan pendaftaran, rendahnya pemahaman atau pengetahuan para pengrajin serta kendala yang dihadapi untuk melakukan pendaftaran kerajinan bambu caping. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pengrajin terhadap perlindungan hukum indikasi geografis dan kendala – kendala yang dihadapi saat pelaksanaan pendaftaran Indikasi geografis kerajinan bambu caping. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang sumber data utamanya adalah data primer yaitu wawancara dan dokumen hukum. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa hingga saat ini kerajinan bambu caping belum mendapatkan sertifikasi perlindungan hukum indikasi geografis. Kerajinan bambu caping memiliki ciri khas yang membedakan dengan bambu caping lainnya adalah dari kawatitan kuwung, jebabah, nitikan, jeperan. Melihat minimnya ilmu pengetahuan para pengrajin yang belum mengetahui dan memahami mengenai indikasi geografis, manfaat dan pentingnya pendaftaran hak kekayaan intelektual serta adanya kendala yang berasal baik dari pengrajin dan pemerintah sehingga tidak melakukan pendaftaran kerajinan bambu caping ke dalam perlindungan Indikasi Geografis.

Kata Kunci: kerajinan bambu caping, perlindungan indikasi geografis, hak kekayaan intelektual

Abstract

Bamboo Caping is a handicraft product that has the potential to be protected from Geographical Indications. Geographical indication is a sign indicating the area of origin of a good and / or product which due to geographical environmental factors including natural factors, human factors or a combination of these two factors gives certain reputation, quality and characteristics to the goods and / or products produced. The problems that exist in the caping bamboo handicraft are regarding legal protection that has not been registered, the low understanding or knowledge of the craftsmen and the obstacles faced in registering the caping bamboo handicraft. Therefore, this study aims to determine the craftsmen's understanding of the legal protection of geographic indications and the obstacles they face when registering geographical indication of caping bamboo handicrafts. This study uses an empirical juridical approach, which main data sources are primary data, namely interviews and legal documents. From this research, the results show that until

now the bamboo caping handicraft has not received legal protection certification for geographical indications. The caping bamboo handicraft has characteristics that distinguish it from other caping bamboos, namely from kawatan kuwung, jebabah, nitikan, jeperan. Seeing the lack of knowledge of the craftsmen who do not know and understand about geographical indications, the benefits and importance of registering intellectual property rights as well as the obstacles that come from both craftsmen and the government so that they do not register caping bamboo crafts into the protection of Geographical Indications.

Keywords: bamboo caping craft, protection of geographical indications, intellectual property rights

1. PENDAHULUAN

Berbicara perkembangan zaman, perlindungan atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia seperti merek dan indikasi geografis perlu adanya pengaturan, termasuk halnya dengan hak kekayaan intelektual (HKI). Penghormatan dan penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual di zaman sekarang menjadi sebuah keniscayaan termasuk didalamnya penghormatan, perlindungan, dan penghargaan terhadap hak yang sifat dan eksistensinya dimiliki secara komunal (Djuaeka, 2014).

Hak kekayaan intelektual atau biasa disebut dengan HKI merupakan sebuah hak yang berasal dari karya, karsa dan daya cipta kemampuan intelektual manusia yang memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Kemajuan teknologi informasi dan transportasi telah mendorong globalisasi ekonomi (Marthani, 2013). Kekayaan intelektual merupakan kreativitas manusia yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya. Kreativitas yang dihasilkan dari olah pikir tersebut merupakan suatu karya intelektual seseorang yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap peradaban manusia. Kreativitas tersebut antara lain melalui penemuan-penemuan (*inventions*) dan hasil-hasil dibidang karya cipta dan seni (*art and literary work*) (Siswandi, 2001).

Potensi Indonesia untuk HKI sangat besar, khususnya yang berkaitan dengan Merek dan Indikasi Geografis. Indikasi geografis merupakan salah satu rezim HKI. Pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia masih bergabung dengan pengaturan Merek yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun

2007 tentang Indikasi Geografis. Berdasarkan pasal 56 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 suatu tanda indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk factor alam dan factor manusia yang dijadikan atribut dalam barang tersebut. Indikasi Geografis meliputi nama asal tempat dan asal barang. Perlindungan Indikasi Geografis tidak terbatas pada produk pertanian saja, semua produk yang memiliki keterkaitan dengan factor geografis termasuk factor alam dan manusia sebagai dominasi terbentuknya ciri khas dan kualitas dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis.

Berbeda dengan aspek HKI lainnya, seperti Merek, dimana penamaan terhadap suatu produk disertai logo dan tulisan tertentu, pada Indikasi geografis terdapat produk yang mencerminkan hasil dari suatu daerah dengan menambahkan nama daerah pada produk yang dihasilkan tersebut yang berguna sebagai pembeda antara produk atau benda yang sejenis yang dihasilkan oleh daerah lain (Sudaryati, 2010).

Data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI (Dirjen HKI) hingga tahun 2020 ini Indikasi Geografis yang terdaftar hanya berjumlah 91 (Sembilan puluh satu). Hal ini menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah serta masyarakat dalam melindungi produk potensi Indikasi Geografis di daerahnya.

Salah satu produk hasil kerajinan tangan yang memiliki potensial untuk dapat memperoleh perlindungan Indikasi Geografis adalah kerajinan Bambu Caping. Bambu Caping yang terletak di Desa Ringinagung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan memiliki bentuk yang sama sebagaimana Bambu Caping yang dihasilkan oleh daerah lain, namun yang membedakan adalah dari kawatan kuwung, jebabah, nitikan, jeperan. Saat ini Bambu Caping Ringinagung belum melakukan pendaftaran terkait perlindungan indikasi geografis, dikarenakan banyak diantara para pengrajin tersebut tidak memiliki pengetahuan tentang cara dan prosedur pendaftarannya. Selain itu, mayoritas pengrajin Bambu Caping hanya mementingkan pembuatan Bambu Caping untuk menaikkan omset perdagangan saja tanpa adanya keinginan untuk melindungi hasil karyannya maupun menjadikan Bambu Caping sebagai produk indikasi geografis.

Kurangnya kesadaran hukum di masyarakat diakibatkan karena kurangnya dan terbatasnya sosialisasi dari pemerintah terkait pentingnya perlindungan hukum terhadap suatu karya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat pengrajin Bambu Caping terhadap Hak Indikasi Geografis dan apa kendala yang dihadapi pengrajin Bambu Caping untuk mendaftarkan Bambu Caping sebagai produk indikasi geografis?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, untuk melihat dan mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat daerah Ringinagung khususnya para pengrajin Bambu Caping sekaligus mengetahui kendala apa saja yang dihadapi apabila ingin mendaftarkan Bambu Caping sebagai Produk Indikasi Geografis. Manfaat penelitian ini penulis berharap agar masyarakat khususnya pengrajin Bambu Caping yang ada di Ringinagung mendapatkan pemahaman serta kesadaran terhadap pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual yaitu berupa Indikasi Geografis.

2. METODE

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji dari hukum tertulis, segi teori, sejarah, ruang lingkup, peraturan perundang-undangan (Muhammad, 2004). Dalam hal penelitian ini penulis akan melakukan analisis terhadap perlindungan hukum IG terhadap kerajinan bambu caping di Desa Ringinagung Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemahaman Masyarakat Pengrajin Bambu Caping Terhadap Hak Indikasi Geografis

Bahwa mayoritas pengrajin bambu caping di Desa Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan kurang mengetahui apa yang dimaksud dengan HKI dan indikasi geografis. Kurangnya pengetahuan pengrajin gerabah Bayat tersebut dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dikalangan pengrajin gerabah Bayat yang pada umumnya hanya mencapai Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama saja selain itu peran pemerintah daerah dalam melakukan

sosialisasi kepada para pengrajin bamboo caping terkait perlindungan hukum yang dapat melekat pada kerajinan bamboo caping terkait pemasaran produk saja, tanpa memberikan informasi lebih lanjut terkait perlindungan hukum yang dapat melekat pada kerajinan bamboo caping. Hal ini menjadi salah satu penyebab para pengrajin gerabah kurang memahami pentingnya perlindungan hukum pada gerabah yang diproduksi.

Beberapa pengrajin mengetahui apabila kerajinan tersebut didaftarkan agar mendapatkan perlindungan indikasi geografis ke HKI akan memperoleh keuntungan, akan tetapi para pengrajin merasa cukup dengan pendapatannya setiap bulannya. Karena disisi lain menurut para pengrajin hanya memikirkan bagaimana dapat menghasilkan bambu caping dan memasarkannya dalam jumlah yang banyak sehingga keuntungan yang di dapat akan lebih banyak pula. Para pengrajin berpendapat bahwa urusan mengenai perlindungan hukum terhadap indikasi geografis kerajinan bamboo caping sudah selayaknya menjadi urusan pemerintah terutama pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan potensi dan pendapat sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan.

Kurangnya pemahaman para pengrajin bambu caping di Desa Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan juga menyebabkan kerajinan bambu caping mudah di jiplak oleh pengrajin bambu caping di daerah lain. Dikarenakan belum adanya sertifikasi perlindungan hukum terkait dengan Hak Indikasi Geografis maka dalam hal ini menyebabkan turunnya permintaan pasar terhadap kerajinan bambu caping sendiri akibat dari adanya penjiplakan di beberapa daerah.

Karena pentingnya suatu perlindungan hukum bagi suatu produk atau barang yang diproduksi oleh masyarakat guna mendapatkan terjaminnya dan terjaganya ciri khas pada barang yang diproduksi tersebut dan terhindar dari adanya perbuatan curang yang dapat merugikan baik dari segi materiil maupun moril bagi orang yang mempunyai hak atas produk atau barang. Maka, dengan demikian diharapkan adanya perlindungan hukum bagi kerajinan bambu caping ini segera mempunyai perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual sebagai produk indikasi geografis agar produk tersebut lebih terjaga kelestariannya dan terhindar dari adanya praktek curang yang merugikan para pengrajin maupun merugikan

para konsumen kerajinan ini. Apabila masyarakat hanya memahami pengetahuan hukum saja yang dimiliki hal itu belum memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang – undangan serta manfaatnya bagi pihak – oihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang – undangan yang dimaksud.

3.2 Kendala Yang Dihadapi Pengrajin Bambu Caping Untuk Mendaftarkan Bambu Caping Sebagai Produk Indikasi Geografis

Sampai dengan saat ini kerajinan bambu caping di Ringinagung belum didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak Indikasi Geografis disebabkan karena adanya kendala yang menghambat. Padahal apabila kerajinan bambu caping didaftarkan untuk mendapatkan hak Indikasi Geografis akan memperbaiki potensi yang ada khususnya di daerah Magetan sendiri. Selain adanya potensi untuk mendaftarkan produk kerajinan bambu caping sebagai produk indikasi geografis seperti yang sudah dijelaskan diatas, tentunya juga terdapat adanya kendala - kendala yang dapat menghambat kerajinan bambu caping untuk mendapatkan perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual indikasi geografis. Berikut merupakan faktor – faktor yang menyebabkan terkendalanya kerajinan bambu caping tidak didaftarkan, hal ini bisa berasal dari para pengrajin maupun dari Pemerintah Daerah.

Kendala dari pengrajin yaitu kurangnya pengetahuan oleh para pengrajin tentang pemahaman terhadap perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya Indikasi Geografis. Minimnya pendidikan yang ditempuh oleh para pengrajin bambu caping di Desa Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan merupakan salah satu kendala kurangnya pengetahuan perlindungan hukum Hak Indikasi Geografis. Pentingnya kesadaran baik dari masyarakat maupun para pengrajin mengenai perlindungan hukum Hak Indikasi Geografis, sehingga dapat meningkatkan produksi kerajinan bambu caping.

Kendala selanjutnya adalah kurangnya komunikasi dan kerjasama antara para pengrajin bambu caping di Desa Ringinagung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan menyebabkan kerajinan bambu caping hingga saat ini belum mendapatkan perlindungan hukum Hak Indikasi Geografis. Kurang aktifnya

Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan dalam menjalin komunikasi dengan para pengrajin dalam melakukan penyuluhan atau edukasi serta melakukan pendaftaran perlindungan hukum kepada pengrajin. Sedangkan kurang aktifnya para pengrajin bambu caping dalam hal melakukan konsultasi serta mendapatkan bimbingan kepada para pengrajin untuk mendaftarkan perlindungan hukum terhadap produk buaatannya dirasa juga masih kurang. Sehingga diantara Pemerintah Daerah dengan pengrajin hustru saling menunggu peranan aktif untuk memulainya, sehingga belum terciptanya adanya suatu kerjasama dan komunikasi yang baik antar keduanya. Hal ini mengakibatkan hingga saat ini kerajinan bambu caping di Desa Ringinagung belum mempunyai perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual sebagai produk Indikasi Geografis.

Kendala selanjutnya yang disebabkan dari pengrajin adalah sulitnya melengkapi persyaratan administrasi. Dalam Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dijelaskan adanya syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau lembaga yang ingin mendaftarkan produknya agar mendapatkan perlindungan hukum Hak Indikasi geografis. Begitu juga dengan kerajinan bambu caping Ringinagung, apabila ingin mendapatkan perlindungan hukum Hak Indikasi Geografis harus memperhatikan dan melengkapi adanya syarat – syarat yang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun hingga saat ini pun kerajinan bambu caping di Ringinagung belum mendapatkan perlindungan hukum Hak Indikasi Geografis salah satu kendalanya yaitu kurang lengkapnya persyaratan administrasi dan belum ada yang membuat dokumen khusus mengenai kerajinan caping bambu. Seharusnya persyaratan seperti itu diurus bersama antara pengrajin dengan Pemda Magetan, namun keduanya sama – sama pasif.

Kemudian kendala yang disebabkan dari pemerintah yaitu belum adanya tindak lanjut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan kepada para pengrajin bambu caping setelah dilakukannya sosialisasi. Belum adanya tindak lanjut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan kepada para pengrajin bambu caping setelah dilakukannya sosialisasi mengenai pentingnya mendaftarkan produk kerajinannya agar mendapatkan perlindungan hukum Hak Indikasi Geografis merupakan salah satu kendala yang dihadapi. Selain kurangnya sosialisasi Pemda

Magetan dirasa juga kurang memberikan Pembinaan kepada para pengrajin bambu caping. Sehingga untuk saat ini diperlukan perhatian dan peran aktif oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan dengan pengrajin caping bambu Ringingagung agar kerajinan bambu caping di Ringinagung mendapatkan sertifikasi perlindungan hukum Hak Indikasi Geografis.

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa kendala yang dihadapi pengrajin bambu caping untuk mendaftarkan bambu caping sebagai produk indikasi geografis yaitu meliputi beberapa faktor seperti kurangnya pengetahuan oleh para pengrajin tentang pemahaman terhadap perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya Indikasi Geografis, kurangnya komunikasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan dengan Para Pengrajin Caping Bambu Ringingagung, kurang lengkapnya persyaratan administrasi untuk melakukan pendaftaran mengenai sertifikasi perlindungan hukum Hak Indikasi Geografis, dan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah Magetan kepada para pengrajin bambu caping Ringingagung.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pengetahuan pengrajin bambu caping di Desa Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan terkait hak indikasi geografis masih sangat kurang hanya beberapa pengrajin bambu caping yang mengetahui hak indikasi geografis. Mayoritas pengrajin bambu caping hanya mengenyam pendidikan hingga Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah saja hal ini juga menjadi salah satu penyebab para pengrajin kurang memahami perlindungan hukum terhadap hak indikasi geografis. Beberapa pengrajin bambu caping yang mengetahui hak indikasi geografis pada umumnya hanya memahami jika bambu caping dapat memperoleh perlindungan hukum karena ciri khas yang dimiliki namun tidak mengetahui bagaimana langkah – langkah yang harus diambil untuk memperoleh sertifikasi indikasi geografis terhadap kerajinan bambu caping. Hingga saat ini, para pengrajin bambu caping hanya terfokus pada cara menghasilkan dan memasarkan kerajinan bambu caping dalam jumlah yang banyak sehingga keuntungan yang

didapat relative besar. Mayoritas pengrajin bambu caping mengabaikan perlindungan hukum yang dapat dilekatkan pada kerajinan bambu caping.

Minimnya ilmu pengetahuan yang dimiliki kalangan pengrajin bambu caping menjadi salah satu penyebab pengrajin tidak mengetahui aturan – aturan yang dibuat untuk melindungi produk – produk daerah yang mana kemudian hal ini menimbulkan rasa tidak ingin tahu kalangan para pengrajin terkait perlindungan hukum yang dapat melekat pada kerajinan bambu caping. Mayoritas pengrajin beranggapan bahwa hal tersebut sudah seharusnya menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi produk-produk lokal atau daerah.

Beberapa kendala yang dihadapi para pengrajin bambu caping untuk mendapatkan sertifikasi perlindungan hukum atas Hak Indikasi Geografis berasal dari Pengrajin Bambu Caping dan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan sendiri, beberapa faktor atau kendala yang dihadapainya yaitu: kurangnya pengetahuan oleh para pengrajin tentang pemahaman terhadap perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya Indikasi Geografis. Hal ini disebabkan karena rendahnya pendidikan masyarakat Desa Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan sehingga mengakibatkan masyarakat khususnya para pengrajin tidak memiliki kesadaran hukum terhadap produk kerajinan bambu caping.

Kurangnya Komunikasi dan Kerjasama antara Para Pengrajin Bambu di Desa Ringinagung dengan Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan karena kurang aktifnya baik peran para pengrajin bambu caping untuk mendaftarkan sertifikasi perlindungan hukum hak indikasi geografis terhadap produk kerajinan bambu caping dan juga Pemerintah Daerah yang kurang memperhatikan adanya kerajinan produk local yang seharusnya bisa mendapatkan perlindungan hukum Hak Indikasi Geografis.

Sulitnya Melengkapi Persyaratan Administrasi. Hal ini disebabkan karena para pengrajin sudah tidak ingin tahu menahu dan tidak mau dibuat susah untuk mempersiapkan persyaratan pendaftaran sertifikasi perlindungan hukum Hak Indikasi Geografis terkait dengan kerajinan bambu caping.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan walaupun sudah memberikan sosialisasi sesekali terkait dengan perlindungan hukum Hak Indikasi

Geografis namun belum ada tindak lanjutnya. Akibat belum adanya tindak lanjut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan kepada para pengrajin bambu caping di Desa Ringinagung ini berbagai masalah muncul dari pengaplikasiannya salah satunya ialah pemikiran masyarakat bahwa aturan dibuat hanya untuk memberatkan para pengrajin hingga penambahan beban.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran kepada pengrajin maupun pemerintah daerah: Untuk pengrajin, diharapkan agar lebih paham dan sadar akan pentingnya perlindungan hukum terhadap kerajinan Bambu Caping di Desa Ringinagung, khususnya terhadap perlindungan hukum indikasi geografis. Selain itu pengrajin juga harus lebih aktif untuk mendaftarkan dan mempersiapkan pendaftaran agar mendapatkan perlindungan hukum indikasi geografis di Desa Ringinagung.

Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, diharapkan agar lebih sering memberikan sosialisasi atau pemahaman mengenai perlindungan hukum Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya Hak Indikasi Geografis. Setelah sosialisasi seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan menindaklanjuti kepada para pengrajin bambu caping agar segera mendaftarkan kerajinan bambu caping sehingga mendapatkan perlindungan hukum indikasi geografis. Hal ini dilakukan juga untuk mengembangkan potensi dari daerah Magetan dan dapat mengangkat nama dari Magetan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI, 2020. Indikasi

Geografis Terdaftar(online), <http://www.dgip.go.id/>, diakses 09 Maret 2020.

Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Siswandi, Achmad Gusman Catur . (2001). “Perlindungan Hukum Terhadap Asset Pengetahuan Tradisional”. *Hasil penelitian, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung*.

Sudaryati. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media.